

# **BAB I**

## **PARTAI POLITIK**

### **PADA MASA PENJAJAHAN**

Kepartaian yang terjadi di Indonesia, sudah mulai tumbuh dan berkembang sejak masa kolonial Belanda, untuk hal yang menarik untuk disimak dalam buku ini, dimulai dari kepartaian ini dari sejak masa penjajahan Belanda. Kita akan mundur ke belakang (*flash back*) guna mengetahui perkembangan partai-partai politik pada masa penjajahan. Partai-partai politik pada masa penjajahan merupakan embrio bagi tumbuh dan berkembangnya partai-partai politik pada saat ini. Perkembangan partai-partai politik pada masa penjajahan dapat kita bedakan dalam dua kelompok besar, yaitu pada masa penjajahan Belanda dan pada masa pendudukan Jepang.

Secara umum pembahasan masalah kepartaian ini terdiri dari tiga pembahasan. Dimulai dengan pembahasan mengenai partai politik pada masa penjajahan, pembahasan mengenai jumlah partai politik, dan pembahasan mengenai partai-partai politik pada zaman Jepang. Adapun tujuan buku

ini adalah menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan partai-partai politik pada masa penjajahan Belanda dan Jepang.

Setelah mempelajari dan menguasai buku ini, diharapkan Anda mampu menjelaskan:

- Perkembangan partai politik pada masa penjajahan.
- Jumlah partai-partai politik pada masa penjajahan.
- Perkembangan partai politik pada zaman Jepang.

## **A. Awal Mulanya Partai**

Pada tanggal 20 Mei 1908 berdirilah di Jakarta sebuah organisasi pertama di antara bangsa Indonesia yang disusun dalam bentuk modern bernama Budi Utomo (Boedi Oetomo), di bawah pimpinan Dokter Wahidin Sudirohusodo dan Dokter Oetomo. Bentuk modern ini seperti dikemukakan A.K Pringgodigdo dalam pengertian "yaitu dengan pengurus tetap, anggota, tujuan, rancangan pekerjaan, dan sebagainya didasarkan atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan".

Tujuan perkumpulan ini yang diputuskan dalam kongres pertamanya tanggal 5 Oktober 1908 di Yogyakarta adalah "kemajuan yang selaras (harmonis) buat negeri dan bangsa, terutama dengan pengajuan pengajaran, pertanian, peternakan dan dagang, teknik dan industri, kebudayaan (kesenian dan ilmu)". Dalam kongres tersebut di tetapkan pula R.T Tirtokusumo, Bupati Karang Anyer, sebagai ketua pengurus besar yang pertama. Sedang anggota-anggota pengurus besar terdiri dari pegawai negeri atau bekas pegawai negeri belaka. Di samping itu, pusat perkumpulan

ditetapkan di Yogyakarta.

Dari hal-hal tersebut, dapat diketahui bahwa Budi Utomo ketika itu hanyalah merupakan organisasi sosial kebudayaan dengan keanggotaan tersebut di kalangan kaum priayi Jawa. Sebagaimana dicatat oleh Pringgodigdo, "Budi Utomo dahulunya hanya bekerja berdasarkan kebudayaan dan sosial saja." Atau seperti yang ditandaskan Nagazumi Ahira, "Budi Utomo dalam tahun-tahun ini tidak lebih dari suatu gerakan budaya (*cultural*) yang lebih dikhususkan lagi bagi emansipasi priayi-priayi Jawa." Miriam Budiardjo, sarjana ilmu politik Indonesia, pun menyatakan pendapatnya, "Budi Utomo merupakan organisasi yang bertujuan sosial."

Jadi, Budi Utomo di awal kehadirannya itu bukanlah sebuah partai politik dalam artian modern serupa pengertian yang dirumuskan Sigmund Neumann, Carl J Friedrich, Rh. Soltau, Huszar dan Stevenson, atau Miriam Budiardjo. Agaknya Budi Utomo kala itu lebih dikenal disebut sebagai "embrio" partai politik. Sebab, paling kurang baru tujuh tahun kemudian Budi Utomo terjun ke arena "perpolitikan", sehingga pada waktu itulah partai ini mulai menjalankan peranan sebagai partai politik. Berikut pernyataan Pringgodigdo yang dapat dibuktikan:

"Budi Utomo dalam rapatnya di Bandung tanggal 5 dan 6 Agustus 1915 menetapkan mosi, yang menegaskan milisi perlu sekali diadakan untuk bangsa Indonesia jaya. Tetapi, hal ini harus diputuskan dalam parlemen yang bakal mengadakan undang-undang (parlemen II ketika itu belum ada). Dewan Perwakilan Rakyat harus diadakan lebih dahulu.

Budi Utomo ikut duduk dalam komite Indie Weerbaar.”

Komite ini pada tanggal 23 Juli 1916 menyatakan keyakinannya bahwa dalam perang dunia waktu itu, “Bagi Hindia Belanda adalah suatu kepentingan hidup untuk selekasnya memperoleh kekuatan yang cukup baik di laut dan di darat untuk mempertahankan diri.” Dalam utusan ke Negeri Belanda menghadap Sri Baginda Raja Puteri, turut serta utusan Budi Utomo (Dwijosewojo).

Volksraad akan diadakan (undang-undang dari Desember 1916, dijalankan Agustus 1917, dibuka Mei 1918). Penting juga tindakan pengurus besar Budi Utomo pada waktunya itu memajukan diri mengadakan komite nasional (terdiri dari pemimpin-pemimpin perkumpulan-perkumpulan Indonesia yang besar). Dalam bulan Juli 1917, di Jakarta, Komite Nasional mengadakan sidang untuk merundingkan arah jalan penunjukan dan pemilihan yang pertama dari anggota-anggota Volksraad.

Sebulan sebelum itu (Juni 1917), Budi Utomo telah menetapkan sebuah program politik, bercita-cita mewujudkan pemerintahan parlementer berasas kebangsaan. Lalu, kalau memang Budi Utomo bukan partai politik dalam arti modern pertama, manakah partai yang datang duluan tersebut. Untuk itu, marilah kita coba memeriksa organisasi kedua sesudah kemunculan Budi Utomo, yaitu Sarekat Islam.

Sarekat Islam berasal dari SDI yang didirikan akhir tahun 1911 di Solo oleh Hadji Samanhudi. SDI berdasarkan kooperasi dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam. Tanggal 10 September

1912, SDI diubah menjadi Sarekat Islam, ketuanya dijabat oleh Hadji Samanhudi dan HOS Tjokroaminoto menjabat sebagai komisaris.

Karena residen Surakarta, dilarang menerima anggota baru dan mengadakan rapat. Di samping karena diperluasnya dasar perkumpulan (tapi tanggal 26 Agustus skors itu dicabut lagi). Tujuannya berkembang menjadi: memajukan semangat dagang bangsa Indonesia, memajukan kecerdasan rakyat, dan hidup menurut perintah agama, menghilangkan paham-paham yang keliru tentang agama Islam.

Dalam waktu singkat, Sarekat Islam yang sejak berdirinya ini diarahkan ke rakyat jelata, berkembang pesat. Pada kongresnya yang ketiga, 17-24 Juni 1916 di Bandung, telah berdiri 80 Sarekat Islam daerah dengan lebih kurang 800.000 anggota. Tiga tahun kemudian (atau tahun 1919), jumlah anggotanya meningkat sampai dua juta. Setahun sebelumnya atau tepatnya tanggal 18 Mei 1918 ketika Volksraad mulai dibuka, Sarekat Islam pun mendudukkan dua orang anggotanya, yaitu Tjokroaminoto sebagai anggota Volksraad yang diangkat oleh pemerintah dan Abdul Muis sebagai anggota Volksraad yang dipilih.

Selain itu, Sarekat Islam pun bersikap berani. Seperti tercermin dalam kongresnya yang ketiga di Surabaya 29 September hingga 6 Oktober 1918, menentang pemerintah sepanjang tindakannya "melindungi kapitalisme", memajukan tuntutan agar pemerintah mengadakan peraturan-peraturan sosial bagi kaum buruh (upah minimum, maupun maksimum, lamanya bekerja, dan sebagainya) untuk

mencegah penindasan dan perbuatan sewenang-wenang.

Dengan demikian, tampak jelas keterlibatan Sarekat Islam dalam pengorganisasian massa, penambahan anggota, dan rekrutmen pimpinan, memengaruhi proses politik. Sehingga berdasarkan tingkah laku yang ditunjukkannya itu, kita lebih dari sependapat dengan apa yang dikemukakan Daniel Dhakidae.

Sangat boleh jadi partai dalam arti modern sebagai suatu organisasi massa yang berusaha untuk memengaruhi proses politik, merobek kebijaksanaan dan mendidik para pemimpin, serta mengejar penambahan anggota baru lahir di Indonesia ketika didirikan Sarekat Islam pada tanggal 10 September 1912.

Bukan hanya Daniel Dhakidae saja yang mengemukakan soal ini. Beberapa orang yang pernah menggelimangi kepartaian di Indonesia telah menyatakan pula pendapatnya yang senada dengan itu. Umpamanya K.H. Saifuddin Zuhri secara tegas menyebutkan: "Sarekat Islam akhirnya berubah menjadi partai politik pertama di Indonesia." Atau A. Tambunan yang menulis: "Di Indonesia mulanya timbul partai-partai politik adalah di lingkungan masyarakat Islam seperti Sarekat Islam."

Jadi mula-mula adanya partai politik di Indonesia diawali oleh sebuah organisasi di lingkungan masyarakat Islam bernama Sarekat Islam, atau dengan perkataan lain sarekat Islamlah partai politik dalam artian modern yang pertama dan relatif memenuhi persyaratan definisi partai politik para ahli. Kalau misalnya ada pendapat sebagian orang yang menolaknya dengan alasan Tjokroaminoto

tidak mau menyebut Sarekat Islam sebagai sebuah partai politik, sebagaimana antara lain dinyatakan dalam kongres Sarekat Islam pertama 26 Januari 1913 di Surabaya bahwa "Sarekat Islam bukan partai politik", maka menurut hemat kita pendapat tersebut kurang tepat. Sebab pernyataan Tjokroaminoto yang demikian tidak lain semacam siasat atau dalih untuk mengelak dari pasal 111 RR tahun 1854.

Belakangan (1921) Sarekat Islam ini terpecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam merah yang melahirkan PKI dan Sarekat Islam putih yang memunculkan partai Sarekat Islam (PSI). Akibat semakin majunya aliran cita-cita Indonesia Raya sebagai hasil aksi golongan nasionalis terpelajar, PSI semenjak tahun 1929 berganti nama dengan PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia). Pada bulan Maret 1933, PSII mencapai popularitasnya di mana jumlah anggotanya tercatat kira-kira sebanyak 30.000. Tetapi, perselisihan-perselisihan di antara sesama pengurusnya karena soal Ko dan Non-Kooperasi telah mengakibatkan PSII terpecah dan munculnya partai-partai baru di samping PSII sendiri. Partai tersebut antara lain partai Islam Indonesia (PARII) yang didirikan di penghujung tahun 1932 di Jogja di bawah pimpinan dr. Sukirman. Dan Penyeदार yang dibentuk oleh H. Agus Salim pada penghabisan tahun 1936 di Jakarta.

## **B. Jumlah Partai Politik**

Sesudah Sarekat Islam sebagai partai pertama berdiri 10 September 1912, bermunculanlah kemudian perkumpulan lain yang dari identitasnya layak pula diberi predikat sebagai partai politik. Berikut ini kita coba